

**DIPLOMASI NON TRADISIONAL INDONESIA DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP ASEAN COMMUNITY**



**OLEH :**

**IKHWANUL AULIA**

**E061181343**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DIPLOMASI NON TRADISIONAL INDONESIA DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP ASEAN COMMUNITY

N A M A : IKHWANUL AULIA

N I M : E061181343

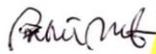
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Februari 2022

Pembimbing I,

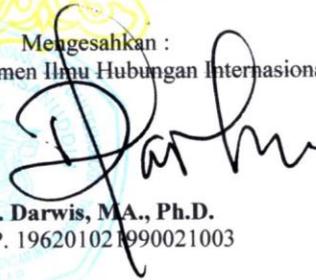
Pembimbing II,



**Drs. Patrice Lumumba, MA**  
NIP. 196110121987011001

**Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D**  
NIP. 197602022000122003

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DIPLOMASI NON TRADISIONAL INDONESIA DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP ASEAN COMMUNITY)

N A M A : IKHWANUL AULIA

N I M : E061181343

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 7 Februari 2022.

TIM EVALUASI

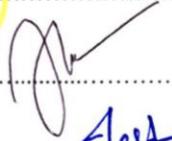
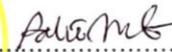
Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwanul Aulia

Nomor Induk : E061181343

Judul Skripsi : Diplomasi Non Tradisional Indonesia Dan Pengaruhnya  
Terhadap Asean Community

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).  
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti  
ketidakeaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan  
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2022



Ikhwanul Aulia

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan shalawat baginda Rasulullah SAW atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penulis benar-benar menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, baik dari segi penulisan dan pembahasan yang memerlukan penyempurnaan.

Pencapaian ini tentunya tidak luput dari bantuan dan kerja sama yang luar biasa dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak **Patrice Lumumba** dan Mama **Andi Tenri Tungka** Terimakasih untuk seluruh pengorbanan dan dukungan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
2. Kepada Saudara-saudara saya **Muh Teguh Prawira** dan **Muh Ainul Amal** yang dengan sabar, senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.,**

4. Kepada **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si.**, serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Kepada Bapak **H. Darwis MA, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional
6. Kepada Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA** selaku dosen pembimbing I  
Terimakasih banyak atas semua bantuan, pengorbanan waktu, dan ilmunya,  
dan Ibu **Seniwati S,sos, M,Hum, Ph,D** Terimakasih banyak atas semua ilmu yang telah diberikan.
7. Kepada seluruh dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional, Pak **Husain Abdullah, Pak Adi Suryadi, Pak Munjin, Pak Aspiannor, Pak Bur, Pak Ishaq, Pak Nasir, Pak Agus, Pak Ashry Sallatu, Pak Aswin, Kak Aca, Kak Bama, Ibu Puspa** Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada Staf Departemen Hubungan Internasional **Kak Rahma, Ibu Tia, Ibu Fatma**, dan **Pak Ridho** juga **Kak Ita**. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi.
9. Kepada Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dalam segala hal Terimakasih banyak.
10. Terimah Kasih Kepada **Elmawdy Fathihasy Syena** yang telah mensupport saya selama perkuliahan.
11. Kepada Teman-teman seangkatan **REFORMA 2018** yang punya peran besar di dunia kampus, Terimakasih banyak untuk kalian semua.

12. Kepada Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan **Ahmad Salim, Robby Adi, Ahmad Azhar Razak, I Putu Tirta Adiyasa, Muhammad Adnan, Muhammad Abdillah, As'ad Azhari Isrullah, Alif Izha, Alwan Ayyasy, Daffa Al Haq, Luthfania Andriani, Andi wingky Septiawanda, Nabil Rizkya, Resky Mulyadi, Nurnaningsih Alhasmi** Terimakasih atas segalanya, sampai jumpa dipuncak karir teratas kita masing-masing.
13. Kepada **Fadhil Pramadiansyah, Mario Kaisar fahrevi, Naswan Nasrun, Ryan Anggriawan, Naswan Nasrun Hamdat, Rahmat Riyadi, Syahrin Janary, Yusril Ansari, Munif Arif Ranti, Yusril Partang,** Terimakasih untuk semuanya.
14. Kepada **HIMAHI Fisip Unhas** Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
15. Kepada **FOINTS 18** Teman-teman seperjuangan di SMA NEGERI 1 GOWA (SALIS) Terimakasih atas supportnya selama ini.
16. Kepada **Annisa Nadila, Andi Dea, Irzal Irfandi, Andi Zulkify, Andi Rama, Andi Ishak, Andi yuya, Ashary Wijaya, Welly, Andi Muh Nur Fajrin, Ardin Rahim, Muhammad Salman, Ahmad Setiawan, Muhammad Dzaky, Nur Asriany, Andi Pallawa Rukka** Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Teman-teman KKN Gowa 4 Terimakasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu kepada penulis selama menjalani masa-masa KKN.

18. Kepada Teman-teman Magang Ombudsman **Ryan Angriawan, Rhin Khairina Rahmat, Indra Arif Mursyid, dan Ibnu Aly Badiu** yang banyak mensupport saya

Akhir kata Penulis ucapkan Terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

## **ABSTRAK**

Ikhwanul Aulia, E061181343. “Diplomasi Non Tradisional Indonesia & Pengaruhnya Terhadap ASEAN Community” di bawah bimbingan Drs. Patrice Lumumba, M.A. selaku Pembimbing I, dan Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing II, pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Diplomasi Non Tradisional Indonesia dan pengaruhnya terhadap ASEAN Community. Untuk dapat menjawab hal ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan, berupa pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, tabloid ilmiah, clipping surat kabar, serta sumber lainnya, yang kemudian diramu dan dianalisis, dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Diplomasi Non Tradisional Indonesia dijalankan berdasarkan amanah Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. Di mana, dalam implementasinya diperjuangkan melalui diplomasi dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya di Kawasan Asia Tenggara.

Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, selalu berinisiatif untuk menjadikan ASEAN sebagai wadah pemersatu bagi kepentingan negara-negara anggotanya. Untuk maksud tersebut, Indonesia memelopori terbentuknya ASEAN Community, yang mencakup tiga pilar yakni: pilar ekonomi, pilar politik & keamanan, serta pilar sosial-budaya. Ketiga pilar ini bertujuan untuk saling memperkuat persatuan & persaudaraan di antara negara-negara anggota ASEAN, serta saling berbagi kelebihan dan menutupi kekurangan masing-masing.

Kata Kunci: Diplomasi Non Tradisional, Indonesia, ASEAN Community

## **ABSTRACT**

*Ikhwanul Aulia, E061181343. "Indonesia's Non Traditional Diplomacy & Its Impact on the ASEAN Community" under the supervision of Drs. Patrice Lumumba, M.A. as Supervisor I and Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D. as Supervisor II, in the Department of International Relations, Faculty of Political and Social Sciences, Hasanuddin University.*

*This research aims to determine the background of Indonesia's Non Traditional Diplomacy and its influence in ASEAN Community. To be able to answer this, author conducted library research, in form of collecting data sourced from books, journals, scientific magazines, scientific tabloids, newspaper clippings, and other sources, which then all of the collected data are processed and analyzed, by using a analytical descriptive method.*

*The results of this study indicates, that Indonesia's Non-traditional Diplomacy is implemented based on the mandate of the Free-Active Foreign Policy. In which, the implementation is fought through diplomacy in order to achieve its national interests, especially in Southeast Asia region.*

*Indonesia as one of the founder of ASEAN, has always taken the initiative to make ASEAN as a unifying forum for the interets of its member states. For that purpose, Indonesia pioneered the formation of ASEAN Community, which includes three pillars such as: the economic pillar, the political & security pillar, and the social-cultural pillar. these three pillars aim to strengthen the unity and brotherhood among ASEAN member states, as well as sharing strengths and covering each other's weaknesses.*

*Keyword: Non Traditional Diplomacy, Indonesia, ASEAN Community*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Dan Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	12
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Konsep Tentang Diplomasi .....	24
B. Konsep Komunitas.....	31
C. Konsep kerja sama Internasional .....	34
D. Konsep Kawasan.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DIPLOMASI NON-TRADISIONAL INDONESIA &amp; KOMUNITAS ASEAN</b> .....	40
A. 1. Diplomasi Non-Tradisional Indonesia.....	40
2. Substansi dan Tujuan.....	42
B. Komunitas ASEAN.....	50
1. Latar Belakang.....	50
2. Substansi dan Tujuan.....	54
2.1 Komunitas politik keamanan .....	54
2.2 Komunitas ekonomi ASEAN.....	55
2.3 Komunitas Sosial Budaya.....	55
<b>BAB IV WUJUD PERAN DIPLOMASI NON-TRADISIONAL INDONESIA</b> .....	59
A. Pelopor Kerja Sama Ekonomi .....	59
B. Pelopor kerja sama Politik dan Keamanan.....	66

C. Pelopor Kerja Sama Sosial Budaya .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
<b>B. SARAN-SARAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks Hubungan Internasional Diplomasi sering dinyatakan sebagai instrumen pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara. Hal ini dapat terjadi di karenakan bahwa setiap negara di dunia ini, masing menjalankan hubungan luar negerinya, dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Instrumen atau sarana yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya itu, adalah diplomasi.

Sejak kemunculannya hingga dewasa ini, diplomasi sering diberi istilah yang beragam sesuai dengan era berlakunya masing-masing, seperti diplomasi lama dan diplomasi baru (Modern) diplomasi konvensional dan non konvensional, serta diplomasi tradisional dan non-tradisional. Yang pada hakekatnya adalah sama, hanya dibedakan oleh era berlakunya dan aktor pelaksanaannya. Diplomasi Tradisional Dan Non Tradisional inilah yang akan menjadi bahasan penulis dalam skripsi ini.

Pelaksanaan diplomasi mengalami perubahan sesuai proses perkembangan politik dunia. Diplomasi sebagai proses komunikasi selalu melibatkan kepentingan politik negara, ternyata sudah berlangsung sejak lama. Secara tradisional, kegiatan diplomasi di masa lalu memang lebih banyak menitik-beratkan pada kepentingan menyelesaikan persoalan politik

akibat adanya perbedaan kepentingan politik antar negara, selain juga menghindari timbulnya konflik karena persoalan pribadi di antara para Raja.

Para diplomat yang melaksanakan diplomasi di masa itu lebih banyak dipaksa, ditekan, dan diwajibkan oleh kekuasaan didalam negerinya untuk mensukseskan ambisi kerajaan atau pemerintah. Diplomasi tradisional ini berlangsung di Benua Eropa sampai permulaan abad ke-20, yang antara lain menghasilkan suatu sistem hubungan internasional yang dikenal dengan nama The Concert of Europe. Kehidupan politik dan diplomasi yang kadang-kadang saling bersaing, saling mempengaruhi dan juga saling mengadakan kerja sama untuk menguasai kehidupan politik di eropa.<sup>1</sup>

Perkembangan situasi dunia, aktor dan teknologi informasi membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern atau diplomasi non tradisional. Perkembangan teknologi informasi membuat pilihan-pilihan alat diplomasi menjadi beragam. Jika sebelumnya diplomasi banyak diwarnai isu-isu lain seperti lingkungan, terorisme, Kesehatan, hak asasi manusia, menjadi sasaran dari diplomasi non tradisional.

Secara umum, diplomasi non tradisional merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan komunikasi dengan publik mancanegara (Foreign Public), tujuannya meliputi dua hal, yaitu

---

<sup>1</sup>Abdul Irsan, Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, Hal. 87, 2007

mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Seiring dengan zaman pula, diplomasi tidak lagi menjadi pekerjaan yang hanya dilakukan oleh elit negarawan. aktor-aktor dalam diplomasi tidak lagi terbatas hanya pada negara sebagai aktor tunggal.<sup>2</sup>

Diplomasi modern atau yang dikenal dengan diplomasi non tradisional, menunjukkan gejala baru dimana agen-agen non pemerintah mendapatkan tempat dalam praktik diplomasi antar negara. Meskipun pada hakikatnya tetap membawa identitas negara dan berpedoman pada tujuan negara. Isu yang dibawa dalam diplomasi modern juga telah masuk kedalam law political issue yang menandakan bahwa isu dalam diplomasi modern telah mengalami perluasan.

Diplomasi modern, ditandai dengan hadirnya bentuk-bentuk diplomasi seperti, diplomasi publik dan diplomasi multijalur atau multitrack diplomacy. Kedua bentuk diplomasi ini secara garis besar menjalankan fungsi diplomasinya dengan mengandalkan kolaborasi kerja dari aktor negara dan non negara. Sesuai dengan namanya diplomasi public focus pada diplomasi yang mengedepankan publik sebagai pelaku utama. Melalui diplomasi publik masyarakat dapat berperan dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh pemerintah untuk membutuhkan opini public yang baik di negara lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Citra Hennida, "Diplomasi Publik Dalam Politik Luar Negeri", Surabaya: Airlangga University Press, 2009, Hal. 17

<sup>3</sup>*Ibid.*

Diplomasi multijalur, terlepas dari kenyataan bahwa diplomasi juga mengalami transformasi dari segi aktor dan potensi yang digunakan sebagai alat dalam diplomasi, diplomasi dalam bentuk apapun mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan kepentingan nasional. Diplomasi merupakan segala bentuk Tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan dalam beberapa kesempatan menggunakan media lain selain pertemuan antar negara. Dengan kata lain tiap-tiap Tindakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan kepentingannya melalui jalan diluar perang adalah diplomasi.

Dalam kaitan dengan diplomasi Non-Tradisional Indonesia dan pengaruhnya terhadap ASEAN Community atau komunitas ASEAN, Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan juga sebagai pengagas ide mengenai komunitas ASEAN, berupaya mengambil momentum untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam organisasi ASEAN. keberhasilan dalam menempatkan posisi instrumental Indonesia dalam ASEAN disadari pemerintah akan dapat menjadi modal tambahan untuk meningkatkan Leverage politik luar negeri Indonesia terhadap negara diluar Kawasan ASEAN.<sup>4</sup>

Politik luar negerinya sebenarnya merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai Concentric circle utama politik luar negeri Indonesia. Arti penting ASEAN bagi Indonesia yang utama adalah dengan

---

<sup>4</sup>Pandu Utama Manggala, "Peran Indoensia Dalam Mendorong Terciptanya Regionalisme ASEAN", Jakarta: Pusdiklat Kemlu RI, 2010, Hal. 297

penguatan ASEAN, akan tercipta aspek psikologis perasaan aman dan berkurangnya rasa curiga antar negara anggota, sehingga tercapai rekonsiliasi di antara sesama anggota yang sebelumnya terlibat konflik. Keberhasilan ASEAN dalam menggalang kerja sama politik dan keamanan akan memberi peluang kepada negara-negara anggota untuk mengupayakan stabilitas domestic dan memberi prioritas kepada pembangunan ekonomi.<sup>5</sup>

Nilai penting ASEAN inilah yang membuat Indonesia tidak mengubah komitmennya terhadap ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama dari politik luar negeri Indonesia. Peran Indonesia dalam mendorong terciptanya regionalism ASEAN, akan berpijak pada konseptualisasi regionalism yang lebih komprehensif, yaitu mengeksplorasi kerja sama dan integrasi cross border berdasarkan pemahaman komparatif, historis, dan multilevel perspective. Selain itu, aspek-aspek sosial-kultural juga di perhitungkan dalam rangka menciptakan suatu kerja sama yang utuh dan kuat.

Regionalisasi kemudian dilihat tidak hanya sebagai suatu proses kerja sama ekonomi semata tetapi juga melingkupi isu-isu, seperti kebijakan sosial dan isu keamanan. Pembentukan komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu komunitas politik- keamanan ASEAN (ASEAN political community/APSC) pilar komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN economic

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

community/AEC) dan pilar komunitas sosial budaya ASEAN (ASEAN social-cultural community/ASCC).

Ketiga pilar komunitas ASEAN itu terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan Bersama yang abadi dalam kaitan itu, Indonesia menjadi pengagas pembentukan komunitas politik keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya.<sup>6</sup>

Komunitas ASEAN ini bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan Makmur yang di persatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli. selain itu, komunitas ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional.

Berikut ini uraian tentang ketiga pilar tersebut, yakni<sup>7</sup>

1. Komunitas politik keamanan

Pembentukan komunitas politik keamanan ASEAN (ASEAN political security community/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan dan juga dalam tataran internasional secara lebih luas. Komunitas politik keamanan ASEAN bersifat terbuka, yang

---

<sup>6</sup>*Ibid*, "Selayang Pandang ASEAN", Jakarta: Sekretariat Ditjen ASEAN, 2012, Hal. 11

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 12 – 13

berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri Bersama.

## 2. Komunitas ekonomi ASEAN

Komunitas ekonomi ASEAN (KEA) dibentuk guna mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.

## 3. Komunitas sosial budaya

Komunitas sosial budaya ASEAN bersifat terbuka dan dinamis berdasarkan pendekatan (people-centered approach). Komunitas sosial budaya ASEAN mencakup kerja sama yang luas dan multisektor. Sebagai satu komunitas sosial budaya, masyarakat ASEAN akan Bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kerja sama untuk memperkuat daya saing Kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. ASEAN berupaya membuka akses seluas-luasnya bagi penduduk di negara-

negara anggota dengan memperhatikan kesetaraan gender di berbagai bidang. Misalnya, dibidang Pendidikan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Kesehatan, serta lingkungan hidup.

Indonesia adalah salah satu anggota pendiri ASEAN dan telah menunjukkan kepemimpinan regional sejak lahirnya organisasi itu. Indonesia, sebagai primus inter pares dapat diartikan sebagai “Arsitek” komunitas ASEAN, deklarasi ASEAN pada tahun 1967 adalah sebagai batu-penjuru politik luar negeri Indonesia. Peranan aktif Indonesia dengan memprakarsai pembentukan ASEAN telah menunjukkan citra Indonesia sebagai tetangga yang baik dan bersahabat bagi negara-negara Kawasan.

Keberadaan ASEAN juga secara politik penting bagi Indonesia. ASEAN paling kurang memiliki enam fungsi politik bagi Indonesia, seperti mempertahankan kredibilitas internasional negara, sebagai instrumen untuk memelihara harmoni regional. ASEAN sebagai penyangga keamanan nasional Indonesia, memajukan tatanan regional sebagai tawar-menawar internasional, dan meningkatkan posisi internasional Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia memprakarsai pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community), di mana salah satu unsur terpentingnya adalah pernyataan kembali kesediaan masing-masing

negara untuk ikut serta berupaya mewujudkan dengan rasa kebersamaan yang lebih besar.

Indonesia memandang regionalism Asia Tenggara sebagai landasan politik luar negeri dan diplomasinya Indonesia memberikan prioritas yang paling utama kepada hubungan yang “dekat dan harmonis, kepada penggalangan Kerjasama yang lebih mantap dengan negara-negara tetangga” di sekitarnya, sebab di sinilah terletak “kepentingan nasional dan Kerjasama regional Indonesia yang paling vital”.

Karena itu pula “penciptaan kestabilan dan kerja sama regional di Asia Tenggara akan mendapatkan prioritas yang tinggi. Suatu bentuk Kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang kemudian terpapar dengan jelas dalam deklarasi pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN pada tahun 1967.

Kehidupan intra-regional dan pengelolaanya dalam suatu tatanan regional Asia Tenggara atas dasar hidup berdampingan secara damai terlepas dari sistem sosial-ekonomi masing-masing negara anggota diusahakan melalui peningkatan “laju pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan.

Asia Tenggara yang di idam-idamkan oleh Indonesia adalah Asia Tenggara yang “Integrated”, yang “merupakan benteng dan pangkalan yang paling kuat” untuk “menghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar “untuk“ menghadapi imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun datangnya.

Indonesia bahwa setiap perkembangan di Asia Tenggara berdampak langsung atas pembangunan nasional, dan karena itu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi setiap negara di wilayah ini tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dan stabilitas di wilayah sekelilingnya.

## **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penulis di penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini memfokuskan pada peran Indonesia melalui Non-Tradisional diplomasinya dalam pembentukan ASEAN Community. Fokus penekanan pembahasan skripsi ini, pada pemerintahan Indonesia di era reformasi ini, dimana di era inilah Indonesia mulai menerapkan diplomasinya yang bersifat Non-tradisional (Modern), di bandingkan pemerintahan Indonesia sebelumnya seperti era soekarno dan Suharto, yang mana pada masa itu diplomasi Indonesia bersifat tradisional yang berfokus pada Tindakan konfrotatif di asteng dan masih selalu berfokus pada persaingan senjata.

Dengan dasar ini pula penulis dapat merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari diplomasi Non-tradisional Indonesia?
2. Bagaimana wujud peran Indonesia terhadap pembentukan ASEAN Community?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **A. Tujuan penelitian**

- A. Untuk mengetahui latar belakang diplomasi Non-Tradisional Indonesia terhadap pembentukan ASEAN Community.
- B. Untuk mengetahui wujud peran Indonesia terhadap pembentukan ASEAN Community

#### **B. Kegunaan penelitian**

- A. Dalam bidang akademik, untuk dapat memberikan gambaran tentang peran diplomasi Non-Tradisional Indonesia terhadap pembentukan ASEAN Community dan sebagai sumbangsih pengetahuan bagi para pemerhati masalah-masalah diplomasi Non-Tradisional dan ASEAN Community

B. Kegunaan khusus merupakan kesempatan bagi penulis untuk membuat karya ilmiah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Komunitas ASEAN**

Terminologi komunitas ASEAN merujuk pada pengertian nilai-nilai Bersama, norma-norma, dan simbol-simbol yang memberi identitas atau perasaan kekitaan (sense of we-noss). Karena itu, secara sederhana, istilah pembentukan komunitas dapat diartikan sebagai “pembangunan perasaan kekitaan.” Komunitas ASEAN dapat dijabarkan berdasarkan rumusan community building, dimana kita percaya bahwa komunitas adalah sesuatu hal mengenai orang-orang (people), dan pembangunan komunitas merupakan proses pembentukan suatu kondisi pemikiran (state of mind ).<sup>8</sup>

Keterikatan yang diwujudkan bukannya diantara badan atau institusi, perjanjian atau prosedur, tetapi suatu komitmen, perasaan saling menjaga dan berbagi, perasaan saling berpartisipasi dan berbagi kepemilikan, perasaan saling memiliki dan keterikatan, atau dengan kata lain perasaan sebagai komunitas. Antara konsep open society dan community building saling berkaitan satu sama lain, dalam arti komunitas regional hanya bisa dibangun diatas landasan open society, komunitas regional ASEAN

---

<sup>8</sup>Ratna Shofi Inayati, Menuju Komunitas ASEAN 2015, Jakarta: LIPI, Hal. 15, 2007

meliputi tiga komponen, integrasi regional yang berkembang, perasaan akan adanya suatu identitas regional dan saling berbagi nilai-nilai.<sup>9</sup>

Negara-negara ASEAN perlu melakukan dialog secara lebih luas dengan masyarakat sipil untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tolak. Hal ini memerlukan suatu keterbukaan, dialog sosial mengenai berbagai isu seperti tentang perdamaian, penghapusan internal security act, seperti hak-hak kaum pekerja dan hak asasi manusia. Setelah itu baru bisa berbicara mengenai pembangunan komunitas yang sebenarnya.

Pada tataran operasional kebijakan, gagasan ASEAN Community memperkuat kecenderungan ASEAN sebagai institusi yang memiliki tugas banyak (multipurpose institution). Ini berarti harus ada Kerjasama lebih erat tidak hanya antar Lembaga pemerintahan negara anggota ASEAN, tetapi juga antar berbagai kementerian di dalam negara anggota.

Hal ini disebabkan ASEAN Community mencakup hampir seluruh bidang kerja sama. hal lainnya adalah agar aneka kesepakatan pada tataran regional dapat segera di implementasikan pada tataran nasional dan untuk menghindarkan terjadinya pandangan-pandangan yang bersifat departmentalism pada tataran nasional. Konsekuensi akhir dari kerja sama ini mengharuskan adanya transformasi citra ASEAN dari institusi yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

semata-semata untuk komunitas diplomatik menjadi institusi untuk seluruh pembuat kebijakan.<sup>10</sup>

Meskipun proses perkembangan dan budaya yang melingkupi ASEAN dan tidak sama dengan Eropa, namun kita dapat mengambil manfaat apa yang telah terjadi di Eropa. Perlahan tapi pasti, Eropa mempersiapkan dirinya memasuki dunia baru dalam bentuk tata pemerintahan yang belum pernah ada duanya.

Keberhasilan membangun komunitas ASEAN mensyaratkan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam proses integrasi. ASEAN bisa melakukannya melalui pertukaran ide secara terus-menerus antar stakeholder dan selalu menyebarkan informasi kepada masyarakat ASEAN tentang kemajuan proses membangun komunitas. Selama ini semua pihak merasakan adanya jurang komunikasi antara ASEAN dan stakeholdernya walaupun sudah ada berbagai komunitas mekanisme konsultasi.

Forum konsultasi ini masih terbatas pada inisiatif kebijakan tertentu, sehingga banyak stakeholder yang merasa bahwa jalur untuk ikut serta dalam konsultasi sangat terbatas atau bahkan tidak bisa diakses. Oleh karena itu, membangun jalur komunikasi antara sektor publik, sektor swasta, dan stakeholder lain harus menjadi prioritas bagi ASEAN.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal. 16

Salah satu kebijakan untuk membangun sebuah komunitas ASEAN yang lebih sulit dan akrab adalah memupuk, mengalahkan dan mengembangkan semangat persamaan dan saling membantu. Dengan cara memperbanyak acara dan kegiatan Bersama, cepat tanggap jika ada anggota yang mendapat musibah dan kesulitan, menciptakan kegiatan Bersama untuk menanggulangi masalah-masalah Bersama, misalnya masalah selat malaka, masalah terorisme, dan masalah pengangguran.

Pada kenyataanya komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas *gesellschaft*, yaitu suatu masyarakat yang terbentuk dari komponen (masyarakat) yang beraneka ragam, namun saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain. Hal ini perlu diwujudkan dalam saling pertukaran. Oleh karena itu yang perlu dipikirkan adalah mencari dan menggiatkan saling pertukaran, mencari produk, keunggulan serta keahlian yang khas dari setiap masyarakat negara ASEAN yang memungkinkan.<sup>11</sup>

Terdapat dua dimensi komunitas, territorial dan relational. Dari dimensi relational, komunitas terkait dengan sifat dan kualitas hubungan di dalam komunitas tersebut, dan beberapa komunitas bahkan tidak memiliki batas territorial, seperti komunitas ilmuwan yang bekerja di bidang yang sama atau memiliki batas kekhusuan yang memiliki kontak dan kualitas hubungan yang amat tinggi, Namun mereka dapat saja hidup dilokasi terpisah, kemungkinan bahkan tersebar di seantero dunia. Sedangkan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal. 17

komunitas lain dapat saja diartikan utamanya menurut teritori, misalnya rukun tetangga, namun dalam banyak kasus, kedekatan dan berbagi wilayah tidak dapat dengan sendirinya merupakan suatu komunitas, karena itu dimensi relational juga sangat esensial.<sup>12</sup>

Namun demikian, komunitas bukan hanya ditentukan oleh wilayah, melainkan juga relational. Jika para anggota komunitas itu saling bertemu dalam artian berinteraksi bertatap muka itulah komunitas yang sesungguhnya atau yang aktual. Namun, komunitas dapat juga sesuatu yang “dibayangkan” karena para anggotanya tidak saling berinteraksi bertatap muka, melainkan para anggotanya memiliki dalam pikirannya suatu citra mental mengenai kedekatan diantara mereka.

Komunitas politik bukan hanya terbatas pada teritori yang membentuk negara bangsa, melainkan lebih luas pada tingkatan regional ataupun internasional. Itulah yang di sebut sebagai “imagined security community” oleh kalangan pendukung pendekatan komunitas untuk memahami politik internasional. Mcmillan and Chavis mengartikan *sense of community* sebagai, suatu perasaan bahwa anggotanya mempunyai rasa memiliki, suatu perasaan dimana para anggota peduli satu sama lain dan pada kelompoknya, dan berbagai kepercayaan bahwa kebutuhan para anggotanya dipenuhi melalui komitmen mereka untuk menjadi Bersama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 20

Bangunan komunitas yang berasal dari pendekatan strategi ini kemudian mengilhami beberapa perancang teori hubungan internasional untuk mengkaji politik internasional bukan hanya melalui konsep power, melainkan, dan terlebih lagi, melalui pendekatan komunitas. Negara dan warga negaranya adalah bagian dari suatu komunitas yang lebih besar pada tingkatan regional dan internasional. Keinginan menciptakan perdamaian yang stabil dalam jangka Panjang, adanya rasa saling percaya, berlakunya akses resiprositas dan keinginan bersama untuk mewujudkan kemakmuran bagi para anggota komunitas tersebut menunjukkan perwujudan adanya bangunan komunitas keamanan diwilayah tersebut.

Suatu komunitas keamanan dapat diartikan sebagai sekelompok rakyat yang terintegrasi pada satu titik dimana terdapat jaminan nyata bahwa para anggota komunitas tersebut tidak akan berperang satu sama lain secara fisik, melainkan akan menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan cara lain. Deutsch mengobservasi ada dua bentuk komunitas keamanan, yaitu *amalgamated security community* dan *pluralistic security community*.

*Amalgamated security community* ada ketika terjadi penggabungan dua atau lebih unit-unit yang terjadinya independen keadala satu unit yang amalgamasi, contohnya adalah amerika serikat, *pluralistic security*

community sebagai alternatif, tetap mempertahankan independensi hukum dari pemerintahan-pemerintahan yang terpisah.<sup>14</sup>

Negara-negara di dalam *pluralistic security community* memiliki kesesuaian mengenai nilai-nilai inti yang di dorong dari institusi-institusi Bersama, dan tanggung jawab Bersama untuk membangun identitas Bersama akan loyalitas, suatu rasa “Ke-kitaan” dan terintegrasi pada satu titik dimana mereka mempunyai dependable exportation of peaceful change.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, suatu pluralistic security community terbentuk Ketika negara-negara menjadi terintegrasi pada satu titik dimana mereka memiliki *sense of community* yang, pada gilirannya, menciptakan suatu jaminan bahwa, mereka akan menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka diluar perang. Singkatnya, menurut Deutsch, negara-negara yang tergabung di dalam security telah menciptakan bukan hanya suatu tataran yang stabil (a stable order), melainkan pada kenyataanya, suatu perdamaian yang stabil (a stable peace).

Suatu komunitas mengandung karakteristik, pertama para anggota suatu komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. Kedua, mereka yang berbeda didalam komunitas memilikin berbagi sisi dan hubungan langsung, interaksi terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain khusus serta terisolasi, melainkan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Hal. 21

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 21-22

melalui hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tatacara. Ketiga, komunitas menunjukkan suatu resiprositas yang mengeksposikan derajat tertentu kepentingan jangka Panjang didorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan altruisme dapat difahami sebagai suatu rasa kewajiban dan tanggung jawab (A sense of obligation and responsibility).

## **2. Diplomasi**

Dalam konteks hubungan internasional, oxford dictionary memberi arti diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional dengan cara negosiasi. Diplomasi dapat pula diartikan sebagai profesi, aktivitas, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya melalui suatu perwakilan negara diluar negeri. Ernest satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan-hubungan resmi antar pemerintah dari negara-negara berdaulat, kadang-kadang juga hubungan negara berdaulat dengan negara-negara vassal.<sup>16</sup>

Disamping itu mempunyai arti penting yang berbeda-beda menurut the oxford English dictionary diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang di selaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil bisnis atau seni para diplomat, sedangkan menurut Ernest satow, dalam Guide to diplomatic practice.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> S.L. Roy. Diplomasi. Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 2, 1991

<sup>17</sup> Jusuf Badri. Kiat Diplomasi: Pengertian & Ruang Lingkup Jakarta; Restu Agung, Hal. 15, 1993

diplomasi merupakan intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan negara-negara jajahannya. Jadi secara umum diplomasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang merujuk pada konsepsi tentang komunikasi antar negara dalam tataran politik global yang menyangkut pengelolaan dari hubungan antar negara termasuk hubungan dengan negara-negara pelaku lain.

Hakikat diplomasi adalah kegiatan berkomunikasi diantara para diplomat professional yang mewakili negaranya masing-masing, dimana pada umumnya kegiatan itu dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya negaranya masing-masing. Diplomasi dapat pula membahas isu-isu penciptaan perdamaian (peace-making) perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan dan Ham. perjanjian-perjanjian internasional biasanya juga dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disahkan dalam forum lebih tinggi (misalnya KTT atau pertemuan tingkat Menteri).<sup>18</sup>

Dalam arti informal dan sosial, diplomasi adalah pekerjaan yang penuh kebijaksanaan untuk mendapatkan keuntungan strategis atau menemukan solusi yang dapat diterima secara timbal balik atas suatu tantangan Bersama dengan menggunakan seperangkat ungkapan pernyataan yang sopan dan tidak konfrontatif.

Dalam memahami diplomasi, ada banyak elemen dan metode yang harus di eksplorasi guna menghadirkan pemahaman yang komprehensif dan faktual masing-masing elemen memainkan peranan yang berbeda dibidangnya masing-masing

---

<sup>18</sup> Sumaryo Suryokusumo. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH "IBLAM", Hal. 10, 2004

dalam usaha untuk mewujudkan perdamaian. Begitu banyak cabang, serta sub-bidang yang telah muncul dan berkembang, berkaitan dengan studi dan pengembangan diplomasi dan praktiknya. Kita mengenal diplomasi dalam tataran tradisional dan non tradisional, lama dan modern, seiring dengan perkembangannya.<sup>19</sup>

Diplomasi juga telah berevolusi dan berkolaborasi dengan instrument-instrumen baru. Dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas baru dalam implementasi. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktifitas-aktifitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata. Karena tugas utama diplomasi, tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dengan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi terus-menerus ditengah-tengah perubahan yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni atau metode untuk menyampaikan pesan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, militer dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian dan negara (bilateral) dan banyak negara (multilateral).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> S.L. Roy, *Op. cit.*

<sup>20</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op. cit.*

Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar Lembaga informal. Antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi haruslah memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang diplomasi Non tradisional Indonesia terhadap pembentukan ASEAN Community.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berupa buku jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media, baik elektronik maupun non elektronik, di berbagai tempat seperti:

- a. Centre for strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta
- b. Perpustakaan Ali Alatas, Kemlu R.I di Jakarta
- c. Pusat Kewilayahan dan Politik LIPI di Jakarta

### **3. Teknik Analisa Data**

Penulis ini menggunakan teknik analisis data hasil penelitian dengan teknik analisis data kualitatif

### **4. Metode penelitian**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti kemudian menarik secara khusus dalam menjelaskan hasil analisis penulisan ini

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Tentang Diplomasi**

Sebelum membahas secara umum tentang diplomasi, maka penulis terlebih dahulu mengungkapkan tentang pengertian-pengertian dasar dari diplomasi. Menurut Jusup Badri, dalam bukunya kiat diplomasi, pengertian dan ruang lingkup, merangkum beberapa pengertian diplomasi, sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, diplomasi adalah:
  - Urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain
  - Urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain.
  - Pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhitungan antara negara dan negara.
2. Kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S Purwadamintra
  - Urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara negara dan negara
  - Pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dengan negara

---

<sup>21</sup>Jusuf Badri, Kiat Diplomasi, op.cit Hal 6

3. Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English

Management of a country's affair by its agents (ambassadors and ministers), and their direction by the ministry of foreign affairs at home, skill in this (pengelolaan urusan-urusan negara wakil-wakilnya di luar negeri, para duta besar dan duta berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan departemen luar negerinya, keterampilan dalam soal ini). Art of skill in dealing with people so that business is done smoothly. (seni mengenai keterampilan dalam berurusan dengan orang-orang, sehingga bisnis dilakukan berjalan dengan lancar).

4. Menurut pakar kontemporer

Sir Ernest Satow

- The application of tact and intelligence to the conduct of foreign relations between governments of independent states (penerapan kemampuan keterampilan serta intelegensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah diantar negara-negara berdaulat).
- Rumusan lebih singkat, The conduct of business between states by peaceful means. (perjalinan business antara berbagai negara dengan cara-cara damai).
- The conduct of relations between the goverments of states by officially accredited representative (pelaksanaan hubungan

antar-pemerintah berbagai negara oleh wakil-wakil yang ditunjuk untuk itu).

- Rumusan lebih singkat, the conduct of such relations by permanent (that is resident) representatives belonging to official cadres. (pelaksanaan hubungan-hubungan demikian itu oleh wakil-wakil tetap dan berdomisili ditempat bertugas serta termasuk golongan kader-kader resmi untuk tugas-tugas demikian itu).

5. Menurut pengertian secara umum

- Diplomasi adalah istilah yang digunakan semenjak beberapa tahun yang lalu bagi sebuah cabang ataupun disiplin ilmu mengenai hubungan luar negeri berdasarkan pada apa-apa yang tertera dalam diploma-diploma yaitu dokumen tertulis yang berasal dari raja (flassan).
- Ilmu mengenai hubungan luar negeri atau masalah-masalah antar negara dan yang sebenarnya lebih merupakan ilmu ataupun seni berunding (Ch. De Martens).
- Ilmu mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan dari negara-negara atau seni untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan antar bangsa, dan secara lebih khusus lagi diplomasi adalah seni berunding, kata diplomasi secara etimologis berakar pada kata Bahasa Yunani “duplicata” duplikat ataupun copy dari sebuah dokumen yang

dikeluarkan raja, naskah tersebut dilubangi dan kemudian disimpan ke dalam arsip (Garden).

- Diplomasi mencakup seluruh system kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar negara, tujuannya adalah menjamin keamanannya, keharmonisannya, memelihara martabat serta kehormatan masing-masing, dan tujuan langsungnya, memelihara perdamaian serta keharmonisan yang lestari antar kekuasaan (Garden).
- Seluruh pengetahuan dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melaksanakan serta mengelola serba urusan resmi antara negara-negara (de cussy, the diplomat and consul's dictionary).
- Ilmu mengenai serba hubungan antara berbagai negara yang tercipta hasil timbal balik kepentingan-kepentingan, dan prinsip-prinsip hukum antar negara (International Law), dan ketentuan-ketentuan yang di cantumkan dalam traktaat-traktaat ataupun persetujuan-persetujuan internasional.

Menurut definisi atau Batasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa subjek diplomasi itu adalah cara didalam perundingan dan bukanlah sebagai obyek. Tujuan dari diplomasi itu sendiri perhatiannya ditujukan kepada kebijakan luar negeri, sedangkan metodologi dan sarana-sarana yang digunakan dalam

mencapai seperangkat tujuan-tujuan tersebut adalah menjadi perhatian dari diplomasi.

Mengenai istilah diplomasi yang diberikan dalam berbagai definisi oleh para diplomat terkemuka serta para pakar dalam hubungan internasional dan diplomasi meskipun mencakup berbagai aspek didalam diplomasi, tidak satu definisi pun dianggap cukup komprhensif, Sir Ernest Satow dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut:

“diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaann untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negara pengikutnya, atau lebih singkatnya lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara dengan secara damai”.<sup>22</sup>

Banyak penulis hanya memberikan Batasan dan arti diplomsii sendiri walaupun diantara mereka masih belum ada keseragaman, karena itu pemakaian perkataan diplomasi itu dapat mempunyai arti yang berbeda-beda menurut penggunaanya.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak

---

<sup>22</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op cit.*, Hal. 9

dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.

Dengan demikian, diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah sesuatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya. Itu juga merupakan suatu proses politik untuk membina kebijakan luar negeri yang dianut dan ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Disamping itu, diplomasi juga dianggap sebagai pengetahuan, mutu, dan kependaian untuk membendung dan mengurangi adanya konflik internasional yang terjadi.

Diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Diplomasi pada hakikatnya juga merupakan negosiasi dan hubungan antar negara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, untuk itu diperlukan suatu seni dan kemampuan serta kependaian untuk mempengaruhi seseorang sehingga dapat tercapai tujuannya.

Kemampuan untuk berunding itu harus dilakukan secara maksimal agar dapat dicapai hasil yang maksimal pula dalam suatu sistem politik dimana suatu perang mungkin bisa terjadi. Dari Batasan-batasan tersebut diatas, kiranya dapat dilihat pendapat Barston, yang menyatakan bahwa diplomasi itu menyangkut pengelolaanya dari

hubungan antar negara termasuk hubungan negara-negara dengan pelaku-pelaku lainnya, dari aspek diplomasinya, maka diplomasi itu juga menyangkut pemberian saran, penentuan serta pelaksanaan politik luar negeri.<sup>23</sup>

Dengan demikian, diplomasi itu juga merupakan cara-cara dimana negara-negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil lainnya, membecirakan dengan baik, mengkoordinasikan dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau yang lebih luas melalui surat-menyurat, pembicaraan secara pribadi, dengan mengadakan pertukaran, pandangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan bahkan sering dengan ancaman-ancaman dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan lainnya.

Menurutnya diplomasi juga sering dianggap sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan secara damai, meskipun hal itu dapat terjadi misalnya selama perang atau konflik bersenjata atau yang digunakan untuk menggalang Tindakan-tindakan tertentu untuk kekerasan, seperti untuk mencari izin penerbang untuk suatu serangan udara.

Diplomasi pada hakikatnya merupakan kebiasaan untuk melakukan hubungan antar negara melalui wakil resminya dan dapat melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri, perumusan kebijakan

---

<sup>23</sup>*Ibid.* Hal. 11

termasuk pelaksanaannya dalam arti yang sempit atau lebih tradisional, diplomasi itu melibatkan cara-cara mekanisme, sedangkan dalam politik luar negeri ada dasar atau tujuannya.

Dalam arti yang lebih terbatas, diplomasi meliputi teknik operasional dimana negara mencari kepentingan diluar yurisdiksinya dengan demikian saling ketergantungan antar negara, maka telah terlihat meningkatnya pertemuan internasional secara terus-menerus, misalnya seperti konferensi multilateral atau diplomasi parlementer.

Negara satu sama lain telah berhubungan dalam banyak kesempatan dan permasalahan, namun banyak kegiatan diplomatik yang tetap dilakukan secara bilateral dan yang dilakukan melalui saluran biasa diplomatik dari kementrian luar negeri serta misi diplomatik yang berada di negara tersebut. Masalah-masalah yang kritis seringkali dirundingkan dalam tingkatan yang paling tinggi dengan melibatkan kepala negara didalam diplomasi tingkat tinggi dengan melibatkan kepala-kepala dalam diplomasi puncak.<sup>24</sup>

## B. Konsep Komunitas

Sejak awal pembentukannya, ASEAN merupakan suatu kerja sama regional yang didirikan oleh lima negara Asia tenggara (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) berdasarkan suatu kesepakatan Bersama yang dikenal sebagai deklarasi Bangkok. Salah

---

<sup>24</sup>*Ibid.* Hal. 12

satu butir kesepakatan dalam deklarasi Bangkok adalah, akan lebih mengedepankan kerja sama ekonomi dan sosial sebagai perwujudan dari solidaritas ASEAN. Dengan demikian secara sadar ASEAN telah memilih economic road towards peace, berdasarkan asumsi bahwa jika negara-negara ASEAN mencapai kemakmuran, maka akan terwujud dikawasan ini.<sup>25</sup>

Sejak awal didirikannya ASEAN untuk mewujudkan Asia Tenggara Bersatu, sehingga keanggotaan ASEAN telah mengalami perluasan menjadi sepuluh negara (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja) namun ASEAN menghadapi persoalan baru dengan perluasan keanggotaan tersebut karena meningkatnya, tanggung jawab yang semakin besar serta potensi persengketaan internal seperti masalah perbatasan tenaga kerja illegal, masalah asap, Illegal Logging Dsb.<sup>26</sup>

Menghadapi kenyataan tersebut, disadari bahwa ternyata ASEAN belum dapat mewujudkan suatu identitas kolektif atau rasa kekitaan (We Feeling) dimana negara-negara anggota saling menyadari bahwa mereka merupakan suatu keluarga. Namun sebenarnya, cita-cita ASEAN untuk membentuk satu komunitas Asia tenggara yang membantu dalam membangun “An ASEAN Community Of Caring

---

<sup>25</sup>Pandu Utama Manggala, *Op. cit.*, Hal. 297

<sup>26</sup>*Ibid.*

Societies” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang kemudian dikenal dengan ASEAN Vision 2020.<sup>27</sup>

Eksistensi ASEAN ditengah perkembangan internasional dan regional maupun persoalan internal yang dihadapi, serta forum dialog dan kerja sama ASEAN memasuki fase baru. Lebih lanjut kita percaya bahwa suatu komunitas yang sebenarnya harus mengandung dimensi moral dari tabiat kemanusiaan yang memiliki kekuatan berdasarkan kemampuannya menekan kepentingan pribadi dan mewujudkan sinergi dari perbedaan yang ada, serta mengatasi perpecahan dan konflik diantara elemen-elemen dari komunitas yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kita percaya bahwa kualitas proses pembangunan komunitas di Asia Tenggara tidak hanya tergantung pada lingkup dan kedalaman dari upaya kerja sama diantara negara dan pemerintahan regional, tetapi juga pada tujuan moral yang mengarahkan dan memelihara profesi tersebut. Tujuan moral tersebut harus merupakan suatu kekuatan yang mempersatukan, mengatasi hambatan yang geografis, keaneka ragaman kultural, disparatis ekonomi dan perbedaan politik dan ideologi.

Hal itu harus mampu mengatasi asimetri didalam Kawasan, diantara negara yang kuat dan lemah, yang besar dan kecil, yang kaya dan miskin, yang di istimewa dan yang dirugikan. Hal itu harus

---

<sup>27</sup>*Ibid.* Hal. 298

<sup>28</sup>Ratna Sofi Inayah, *Op. cit.*, Hal. 6

mewujudkan pula tujuan yang paling esensial dimana setiap anggota komunitas dapat menyatakannya dan berupaya untuk memenuhinya.

### C. Konsep kerja sama Internasional

Dalam konteks hubungan internasional, Kerjasama internasional merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Kerjasama internasional, tidak hanya menjadi solusi untuk keterbatasan suatu potensi negara dalam mempertahankan keberlangsungannya, akan tetapi, Kerjasama juga menjadi penanda hubungan yang baik antar negara.

Kerjasama yang terjadi antar negara seringkali juga menjadi bukti kedekatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Kerjasama internasional berlangsung demi kepentingan nasional sebagai tujuan yang diperjuangkan oleh masing-masing negara yang terlibat di dalamnya.

Kamus Webster New Pratical Dictionary mendefinisikan kerja sama sebagai sebuah bentuk perkumpulan dari orang-orang yang memiliki kepentingan Bersama, menurut Oxford Reference, kerja sama internasional mengacu pada proses koordinasi kebijakan, dimana negara dan entitas lain (seperti perusahaan multinasional atau organisasi non-pemerintah) melakukan penyesuaian perilaku mereka dengan preferensi actual atau diantisipasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>S.L Roy, Op.cit

Dalam buku *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* yang ditulis oleh Robert O. Keohane, ia menyatakan bahwa kerja sama internasional juga dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana kebijakan pemerintah yang ada di suatu negara. Dianggap oleh mitra negaranya sebagai fasilitator usaha dalam mencapai tujuannya sendiri. Sebagai hasil dari adanya koordinasi kebijakan.<sup>30</sup>

Kerja sama melibatkan koordinasi kebijakan yang didalamnya terlibat penyesuaian perilaku antar aktor terhadap preferensi aktor yang lain. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Keohane ini, konsep kerja sama yang tercermin dianggap sebagai sebuah konsep yang politis, tetapi tidak disamakan dengan “keharmonisan” dan “perselisihan” Kerja sama dalam hal ini sering menuntut pihak-pihak untuk melakukan serangkaian proses negosiasi dan menyesuaikan perilaku mereka dalam konteks Bersama.<sup>31</sup>

Dimana proses ini berjalan berbeda dengan harmoni, tetapi dapat disamakan dengan fakta bahwa ada kepentingan Bersama didalamnya. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya akan dilihat sebagai fungsi dari kepentingan Bersama, tetapi jauh lebih pada tujuan potensial bagi negara.

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff, kerja sama internasional didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan ataupun paksaan dan disahkan berdasarkan hukum. Hal ini seperti dalam sebuah organisasi internasional, seperti ASEAN.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, aktor-aktor negara membangun hubungan kerja sama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang merupakan seperangkat aturan yang disepakati (disetujui), norma-norma, regulasi, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan. Dimana, harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu pada suatu lingkup kerja hubungan internasional.

Kerja sama dapat tumbuh dari suatu komitmen negara untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bersama maupun sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga isu utama dari konsep kerja sama ini, adalah berdasar pada adanya upaya pemenuhan kepentingan yang dapat menghasilkan keuntungan pada kedua belah pihak yang sedang melakukan kerja sama, jika dibandingkan dengan usaha yang dilakukan sendiri atau melalui persaingan.

---

<sup>32</sup>Paper

#### D. Konsep Kawasan

Region atau Kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.

Kawasan juga dapat diartikan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan Tindakan dari negara-negara di luar Kawasan.<sup>33</sup>

Kamus Oxford mendefinisikan Kawasan sebagai sebuah wilayah yang luas, dimana biasanya wilayah ini tidak memiliki batas yang pasti. Dengan pengertian ini, dalam kamus Webster New Practical Dictionary juga mendefinisikan Kawasan atau region sebagai suatu wilayah geografis yang luas yang dibedakan oleh ciri-ciri yang serupa. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud memiliki hal-hal tertentu, baik itu berupa sejarah, ekonomi, budaya, maupun ideology.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Anak Agung Banyu Perwita, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosda karya, Hal. 104, 2014

<sup>34</sup>Paper

Kawasan dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah yang dapat ditentukan secara geografis terdiri atas lebih dari dua bagian negara yang letaknya berdekatan dan didalamnya, terdapat hubungan yang damai dan aman, dimana negara yang ada di wilayah tersebut saling bekerja sama terkait masalah ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain definisi seperti di atas, para ahli juga memberikan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sebuah kawasan. Coulumbus dan Wolfe dalam bukunya berjudul *Intrudction to International Relations, Power and justice* yang dikutip oleh Nuraeni S, dkk, menetapkan empat kriteria, yaitu: 1. Kriteria geografis, kriteria politik/militer, kriteria ekonomi, dan kroteria transaksional.<sup>35</sup>

Konsep Kawasan memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kecenderungan negara-negara yang lebih mudah berinteraksi dengan negara-negara lain yang memiliki kedekatan geografis. Kemudahan dalam berinteraksi dengan negara tetangga dalam satu Kawasan membawa keuntungan yang besar dari segi jarak yang harus ditempuh. Jarak yang dekat membuat transaksi-transaksi dalam Kerjasama berjalan dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan cepat.

Berbagai bentuk kerja sama mulai bermunculan. Khususnya dalam sebuah region, sehingga dapat membantu meningkatkan regioalisasi dalam sebuah kawasan. Hal ini diyakini akan mampu menjawab setiap tantangan

---

<sup>35</sup>Nuraeni S, dkk. *Regionalisme dalam studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 243, 2010

di masa mendatang. Sejarah juga turut membuktikan bagaimana manifestasi regionalisasi yang dapat dilihat pada kerja sama ekonomi, politik dan keamanan yang juga ditandai dengan bermunculannya berbagai organisasi internasional di tingkat regional atau kawasan.

Perkembangan regionalisasi yang terjadi di seluruh dunia ini juga terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Dimana, organisasi regional Asia Tenggara dikenal dengan ASEAN atau Association of Sout East Asia Nations. ASEAN disebut-sebut sebagai salah satu bentuk regionalism yang mapan, yang masih menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pengelolaan kepentingan negara-negara anggotanya.<sup>36</sup>

Dari uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa konsep kawasan sangat relevan untuk menjelaskan hubungan kerjasama antara negara dalam wilayah tertentu tanpa harus membagi fokus pada munculnya organisasi supranatural regional sebagai upaya integrasi kawasan.

Dengan kata lain konsep kawasan lebih flexible karena tidak menuntut adanya organisasi supranasional yang menjadi bukti adanya interaksi dalam bentuk kerjasama antar negara-negara dalam area geografis tertentu. Hal ini yang menjadi pembeda konsep kawasan dengan regionalism yang juga mencoba menjelaskan fenomena Kerjasama antara negara-negara dengan karakter yang sama dengan yang dibahas oleh konsep kawasan.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*